

Implementasi BUMDes dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja bagi Pemuda di Desa Jungjang

Rachman Yushril Fadillah^{1✉}, Mintarsih Arbarini²

^{1,2}Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Semarang
Gedung A2 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang

Email : abcd12@students.unnes.ac.id¹, arbarini.mint@mail.unnes.ac.id²

Article history:

Received: 2022-10-11

Revised: 2022-10-26

Accepted: 2022-10-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan program-program yang diselenggarakan BUMDes, (2) mendeskripsikan penerapan program Distrik BUMDes dalam upaya menciptakan lapangan kerja bagi pemuda, (3) mendeskripsikan hambatan dan solusi yang telah dilakukan selama menjalankan program Distrik BUMDes. Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Subjek penelitian berjumlah 7 orang, terdiri 2 pelaksana BUMDes dan 5 pemuda. Terdapat 2 informan penelitian, Kepala Dusun V dan Sekretaris Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan (1) program-program yang diselenggarakan BUMDes Jungjang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa, (2) implementasi program Distrik BUMDes berbentuk kawasan usaha desa yang menyediakan lapangan kerja melalui kegiatan pemberdayaan calon pekerja, (3) hambatan pelaksanaan meliputi keterbatasan penyebaran informasi, kegiatan pemberdayaan bersifat monoton, dan kurang sesuainya bahan ajar dengan kemampuan partisipan, sedangkan solusi yang diterapkan antara lain menginstruksikan partisipan untuk menyebarluaskan informasi, mengadakan kegiatan pemberdayaan dengan suasana informal, dan mendatangkan tenaga ajar profesional.

Kata Kunci: pemuda, lapangan kerja, BUMDes

ABSTRACT

This study aims to (1) describe the programs held by BUMDes, (2) describe the implementation of the BUMDes District program in an effort to create employment opportunities for youth, (3) describe the obstacles and solutions that have been carried out while running the BUMDes District program. This research approach uses a qualitative case study. The research was conducted in Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. The research subjects were 7 people, consisting of 2 BUMDes implementers and 5 youths. There were 2 research informants, the Head of Hamlet V and the Village Secretary. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and making conclusions. The validity of the data was tested using source triangulation and technical triangulation. The results of the study show (1) the programs organized by BUMDes Jungjang aim to improve the living standards of rural communities, (2) the implementation of the BUMDes District program in the form of a village business area that provides employment through empowerment of prospective workers, (3) implementation barriers include limited information dissemination, empowerment activities are monotonous, and teaching materials do not match the abilities of participants, while the solutions implemented include instructing participants to disseminate information, holding empowerment activities in an informal, and bringing a professional educator.

Keywords: youth, employment, BUMDes

PENDAHULUAN

Pengangguran selalu menjadi pusat perhatian pada setiap negara sebab sering menimbulkan berbagai dampak. Dampak terbesar yang akan dihadapi oleh suatu negara ialah terhambatnya proses pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan. Pengangguran tidak akan pernah lepas dari negara berkembang yang identik dengan tingkat kesejahteraan rendah. Dengan meningkatnya angka pengangguran akan mengganggu struktur perekonomian suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak penduduk. Muhdar (2015) menganggap masalah pengangguran sering kali didefinisikan warga negara yang memasuki angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja karena berbagai alasan. Disebabkan oleh kemampuan pribadi yang rendah, keterbatasan jumlah lapangan kerja, ketidaksesuaian upah, bahkan sudah bekerja tetapi dikeluarkan. *Strict labor regulations can increase unemployment in the world* (Feldmann, 2009). Maksudnya, kebijakan tenaga kerja yang ketat dapat meningkatkan pengangguran di dunia. Dalam hal ini, Franita (2016) juga mengatakan bahwa penyebab seseorang berstatus menganggur yakni rendahnya keahlian, terbatasnya informasi yang beredar, kesempatan kerja yang tidak merata, budaya malas, serta kebijakan pemerintah yang belum tepat.

Sejatinya, keadaan seseorang tidak bekerja sering melekat pada kalangan muda sebab tidak memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin tahun tentu jumlah penduduk akan mengalami peningkatan jumlah sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan di masyarakat. Keadaan seseorang tidak bekerja timbul akibat ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan (Alghofari dan Pujiyono, 2011). Selisih yang terjadi tumbuh secara organik seiring peningkatan jumlah penduduk pada suatu daerah. Bulan Februari 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 144,01 juta angkatan kerja dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,83 persen. Selaras dengan Borgen & Amundson (1987) dalam tulisannya mereka menyampaikan, *unemployment leads to shifts in emotions and cognitions*. Artinya, pengangguran akan berdampak pada mudahnya perubahan emosi dan kognisi seseorang. Faktor seperti memikirkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan pandangan dari lingkungan masyarakat menjadikan seorang pengangguran akan lebih mudah mengalami depresi. Harjanto (2014) membagi bentuk pengangguran dalam tiga macam, yakni:

- 1) Pengangguran friksional, disebabkan oleh kesenjangan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang terbatas atau berhenti bekerja untuk mencari pekerjaan lain.
- 2) Pengangguran silikal, pengangguran silikal diakibatkan adanya perubahan situasi dan kondisi perekonomian suatu daerah yang mengakibatkan pengurangan jumlah angkatan kerja yang bekerja.
- 3) Pengangguran struktural, ditimbulkan adanya perkembangan zaman sehingga berdampak pada standar kualifikasi pekerja yang diharuskan mampu menguasai teknologi.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah yang akan berujung pada situasi menganggur. Pembangunan suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila indikator terpenting seperti tingkat pengangguran yang beredar itu rendah (Indayani & Hartono, 2020). Penanggulangan masalah ekonomi seperti pengangguran bukanlah suatu yang mudah dan perlu dipikirkan dengan perencanaan yang matang. Apabila kebijakan yang diterapkan itu tepat, maka akan mempengaruhi jumlah pengangguran yang merebak luas. Sekarang ini kesejahteraan sangat diperlukan dan diinginkan oleh siapa saja, baik secara individu maupun kelompok organisasi atau lembaga pemerintah. Kesejahteraan penduduk menjadi hal utama yang harus diraih dalam mencapai cita-cita suatu bangsa. Upaya yang berasal dari aktivitas pemerintah menjadi penentu keberhasilan dalam mengentaskan berbagai permasalahan yang dialami dan diresahkan oleh masyarakat. Perencanaan yang baik pada bidang pendidikan, teknologi, ekonomi, pembangunan infrastruktur hingga ketahanan nasional mampu mengubah kondisi ketertinggalan suatu negara.

Di Indonesia, badan pemerintah berperan melaksanakan kebijakan fiskal guna menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diamanatkan bahwa pemerintah menjalankan suatu kebijakan fiskal meliputi perpajakan dan pengeluaran. Kedua instrumen tersebut diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang baik. Bentuk dari kebijakan tersebut, salah satunya adalah penyediaan lapangan kerja sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah. Pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan kemampuan dan aset yang tersedia. Hasan (2020) mengemukakan otonomi daerah berdampak efektif dalam membuat kebijakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah



Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan suatu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan-urusan pemerintahan, menjalankan kebijakan otonomi seluas mungkin, melaksanakan pelayanan bagi masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah, diharapkan pemerintah setempat dapat mengelola dengan baik dan maksimal berdasarkan kebutuhan.

Bentuk penerapan kebijakan otonomi daerah salah satunya ialah pemberian anggaran dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan dana desa diharapkan mampu mewujudkan desa mandiri, maju, dan unggul (Jamaluddin dkk., 2018). Dapat dikatakan, kebijakan dana desa merupakan upaya membangun desa guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berusaha untuk menempatkan kawasan desa sebagai bagian terpenting dalam tatanan negara. Sebab penduduk yang bertempat tinggal di desa memiliki sikap semangat dan rasa gotong royong yang tinggi. Melihat tingginya rasa kebersamaan yang terjalin di lingkungan desa, Undang-Undang tersebut mengarahkan desa agar memiliki badan usaha yang berguna memenuhi kebutuhan masyarakat. Badan usaha yang dimaksud ialah unit kewirausahaan yang bertempat di wilayah desa.

Badan usaha milik desa atau yang biasa disebut BUMDes adalah suatu lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai langkah untuk memperkuat perekonomian. BUMDes dijadikan sebagai sarana untuk menampung dan mengembangkan berbagai kegiatan sesuai dengan adat istiadat, aktivitas yang mencerminkan dukungan pada kebijakan pemerintah, dan kegiatan yang dapat menimbulkan peningkatan pendapatan masyarakat maupun desa (Gunawan, 2011). Tujuan utamanya sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ialah memfasilitasi, memberikan dukungan kepada elemen masyarakat untuk menjalankan usaha secara mandiri maupun bersama. Unit usaha yang dikelola desa mempunyai berbagai peranan untuk memecahkan aneka ragam permasalahan yang diresahkan masyarakat dan mencari serta memperoleh keuntungan demi proses pembangunan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Ridlwan (2014), BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). Lembaga usaha yang dimiliki desa tidak akan pernah lepas dengan persoalan kesejahteraan. Sebagai lembaga usaha yang bertempat di wilayah desa, pendirian BUMDes diharapkan dapat berperan memaksimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aspek ekonominya (Harobu dkk., 2019). Secara rinci pelaksanaan BUMDes mempunyai beberapa peranan yang meliputi:

- 1) Sebagai inisiator, yakni memberikan pengaruh yang dapat dilihat dan dirasakan secara nyata
- 2) Sebagai fasilitator, penting untuk ikut serta dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan menyediakan sarana dan prasarana
- 3) Sebagai perencana layanan usaha desa, perencanaan ialah langkah BUMDes untuk menentukan berbagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik
- 4) Sebagai pengelola usaha desa, yakni melakukan aktivitas yang berupaya untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas

Lestari dan Hapsari (2019) berasumsi keberadaan lembaga BUMDes harus dapat menyerap tenaga kerja produktif dan potensial. Melalui kegiatan yang bersifat dan bertujuan memberdayakan elemen masyarakat, ditujukan sebagai upaya peningkatan kemampuan individu dalam segala aspek pada kehidupannya. Tingkat produktivitas masyarakat dianggap unsur penting dalam pemanfaatan aset wilayah desa. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif akan melahirkan keberhasilan dalam proses pembangunan. Sehingga kegiatan perekonomian dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. Kehidupan masyarakat desa identik dengan bekerja sebagai petani dan pedagang. Pemenuhan dalam keseharian bergantung pada hasil pertanian dan perdagangan, dengan kondisi inilah masyarakat desa sering kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Diperburuk dengan kondisi semakin merebaknya penduduk yang berstatus menganggur sehingga akan menyebabkan kecemasan pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Pada hakikatnya, masyarakat desa adalah golongan warga negara yang mengalami keterlambatan pada segala aspek dalam menerima pengetahuan baru sesuai dengan perkembangan zaman.

Masyarakat desa cenderung memilih pekerjaan yang tidak memerlukan standar tinggi dan mempunyai risiko besar. Pertumbuhan penduduk di wilayah pedesaan meningkat lebih cepat jika dibandingkan dengan perkotaan. Dampak yang dapat dilihat secara nyata ialah sulitnya memperoleh pekerjaan karena membludaknya jumlah penduduk namun tidak dibarengi dengan keahlian yang dimiliki. Sedikitnya lapangan kerja juga dijadikan penyebab seseorang mengalami kesulitan dalam mencari penghasilan. Jenniches (2018), employment is the indikator that most often has an impact on

the economy. Jika diartikan, lapangan pekerjaan merupakan indikator yang berdampak pada aspek perekonomian. Oleh karena itu perencanaan peningkatan kesejahteraan perlu diupayakan dengan berbagai cara.

Pada era pembangunan saat ini, Desa Jungjang melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh badan usaha desanya melakukan aktivitas yang bersifat menyediakan lapangan pekerjaan sekaligus memberdayakan penduduk. Education, training and employment opportunities for public are highly required (Conti-Ramsden et al., 2018). Artinya ialah pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja bagi masyarakat sangat diperlukan. Penyediaan lapangan kerja adalah langkah tepat untuk mengatasi masalah pengangguran, sebab dapat mengurangi gap penduduk berusia angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Sedangkan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk pengembangan kemampuan ke arah yang lebih baik (Lestari dan Suminar, 2020). Lapangan kerja yang dihasilkan dari suatu kebijakan akan melahirkan keadaan terpakainya sumber daya manusia dengan baik yang mampu menghadapi tantangan ekonomi di era globalisasi. Jika jumlah lapangan pekerjaan tinggi namun tak dibarengi dengan potensi penduduk maka akan sia-sisa saja. Maka dari itu, penyediaan lapangan kerja harus dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan kualitas masyarakat.

Arbarini dkk. (2018) menegaskan bahwa tujuan utama dalam memberdayakan kalangan masyarakat ialah sebagai upaya menciptakan suatu kondisi masyarakat yang mandiri dan dapat berkembang. Semakin maju perkembangan teknologi, kompetensi yang perlu dimiliki oleh seseorang juga harus semakin tinggi. Memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul merupakan salah satu cara supaya dapat mengikuti peradaban (Sa'diyah & Arbarini, 2021). Dengan penerapan penciptaan lapangan kerja yang dibarengi dengan aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat, tentunya akan menekan jumlah pengangguran yang diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan dan keterampilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk memahami peristiwa dan mendeskripsikan secara lebih spesifik tentang implementasi BUMDes dalam upaya menciptakan lapangan kerja bagi pemuda desa. Jenis penelitian ini ialah studi kasus kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi mendalam mengenai implementasi program Distrik BUMDes yang merupakan program penyediaan lapangan kerja di Desa Jungjang.

Subjek pada penelitian ini meliputi pelaksana operasional badan usaha desa yang terdiri dari Direktur dan Pengelola Distrik BUMDes, serta penduduk berusia muda. Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan yakni perangkat desa, terdiri dari Kepala Dusun V dan Kepala Desa. Sumber data pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan subjek dan informan. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen seperti profil BUMDes Jungjang dan tugas, pokok, fungsi pelaksana operasional. Instrumen dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah instrumen panduan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga melengkapi data penelitian dengan foto sarana dan prasarana kawasan usaha desa. Data yang diperoleh, selanjutnya akan disajikan dalam bentuk transkrip wawancara, deskripsi hasil penelitian dan deskripsi dokumentasi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menelaah data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara mendalam. Analisis data dimulai semenjak proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, bertujuan untuk membandingkan sumber data hasil pengamatan dengan sumber data hasil wawancara dan dokumen yang ada. Akan dilakukan perbandingan sumber informasi yang diperoleh dari pelaksana operasional BUMDes dan pemuda dengan perangkat Desa Jungjang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program-program BUMDes

Pembentukan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengikuti anjuran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Sayutri (dalam Izzah & Kolopakin, 2020) mengasumsikan bahwasannya kemunculan lembaga kewirausahaan desa berguna untuk menggerakkan aset milik desa dan mengatasi permasalahan yang terjadi. BUMDes dibentuk hasil musyawarah desa di tahun 2018 dan menetapkan sebuah nama yakni Maju Mandiri. Unit usaha desa akan mengayomi masyarakat yang bernasib kurang beruntung dengan dilakukan upaya untuk menggali kemampuan yang dimiliki penduduk setempat (Pangestu, 2020).



Memiliki visi, yakni mewujudkan kemandirian desa dan masyarakat sejahtera. Keinginan desa yang mandiri, tidak bergantung pada daerah lain dalam mencukupi kebutuhan pokok, dan melahirkan situasi serta kondisi sejahtera di kalangan masyarakat merupakan hal yang melandasi penetapan visi tersebut. Misi atau langkah-langkah yang perlu ditempuh meliputi: 1) menciptakan masyarakat desa yang sejahtera, 2) menciptakan desa yang mandiri melalui pemanfaatan potensi desa, 3) menciptakan sumber daya manusia yang unggul, dan 4) mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang pesat, serta 5) memanfaatkan potensi desa yang belum dikelola.

Terdapat tiga program yang diselenggarakan oleh BUMDes Maju Mandiri, secara spesifik adalah sebagai berikut.

- 1) Pengelolaan pasar, berfungsi dalam menata pasar dan memberikan perhatian kepada para pedagang sehingga akan tercipta semangat dalam bekerja dan perasaan yang nyaman serta kepuasan pengunjung saat berbelanja kebutuhan pokok.
- 2) Pengelolaan sampah, upaya menjaga kebersihan wilayah desa dengan memilah jenis sampah khususnya di lingkungan pasar yang dianggap sebagai tempat paling sering digunakan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.
- 3) Tata usaha, mendirikan suatu bangunan usaha desa yang diharapkan dapat membantu permasalahan ekonomi di kalangan penduduk, terdapat juga pengarahan dan pemberian modal kepada seseorang yang ingin berwirausaha.

Titioka dkk. (2020) berpendapat meskipun badan usaha tetapi tujuan BUMDes tidak hanya mencari keuntungan. Mengutamakan kepentingan umum guna mencapai cita-cita desa. Secara menyeluruh program milik BUMDes Maju Mandiri mempunyai dampak positif pada kehidupan masyarakat desa. Tanggapan dari berbagai elemen masyarakat seperti mendukung, ikut serta dan memberikan gagasan memicu semangat pelaksana operasional saat melaksanakan program. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Endah (2019), ekonomi masyarakat desa yang kuat akan tercipta apabila tingginya nilai kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat terjalin baik. Pada akhirnya akan menciptakan suatu keberlangsungan pembangunan desa tanpa hambatan besar. Melalui pengoptimalan keunggulan dan potensi wilayah desa diharapkan dapat mampu meniadakan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Implementasi Program Distrik BUMDes

Distrik BUMDes merupakan bentuk implementasi program bidang tata usaha milik BUMDes Maju Mandiri yang berbentuk kawasan usaha milik desa. Kalangan yang berusia muda cenderung menghabiskan waktunya untuk beraktivitas dan bersantai bersama dengan teman-temannya, akan tetapi wilayah desa memiliki sedikit tempat umum yang digunakan untuk berkumpul. Berdasarkan hal tersebut, pihak BUMDes melihat peluang yang menguntungkan apabila mendirikan kawasan yang bisa dijadikan tempat berkumpulnya kalangan penduduk.

Pada mulanya, Distrik BUMDes merupakan lahan kosong nan kumuh yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar. Desa Jungjang tak akan bisa lepas kaitannya dengan lokasi wilayah yang strategis dikarenakan terletak di sebelah jalur utama pantura yang memiliki tingkat mobilitas keseharian tinggi. Berdasarkan letak geografis, hadirnya kawasan Distrik BUMDes dianggap dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun desa. Seperti yang dikemukakan oleh Utami dkk. (2019), BUMDes memiliki posisi sebagai lembaga perekonomian desa yang bertugas menciptakan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa.

Masyarakat di wilayah desa pada umumnya mengalami keterbatasan pada potensi dirinya. Mengupayakan sebagian penduduk pengangguran yang didominasi oleh penduduk berusia muda untuk ditingkatkan kemampuan dan keahliannya melalui kegiatan pemberdayaan calon pekerja pada kawasan Distrik BUMDes adalah hal yang mendasari alasan program tersebut dijalankan oleh BUMDes. Kegiatan pemberdayaan pada program Distrik BUMDes berfungsi untuk membina, mendidik, dan mengarahkan masyarakat. Dalam kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat terdapat dua kecenderungan yakni terdapat pemberian kemampuan dan pemberian motivasi agar memiliki kekuatan untuk mencapai yang diinginkan (Widyastuti dkk., 2019).

Putra & Arka (2018) berasumsi kegagalan suatu daerah dalam proses pembangunan dapat dilihat dari tingginya pengangguran. Hal tersebut disebabkan terdapat jembatan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja yang tersedia di Distrik BUMDes bukan semata-mata untuk menerima dan mempekerjakan manusia saja. Sebelum seseorang melakukan kegiatan yang menghasilkan upah pada dunia kerja, akan dilakukan aktivitas yang menjadikan berdaya melalui pendidikan dan pelatihan sebagai bekal.

Berikut ini tahapan dalam kegiatan pemberdayaan pemuda sebagai calon pekerja. Pertama, terdapat pemberian materi yang ditujukan kepada partisipan tentang dasar-dasar dalam bekerja. Kedua, dilakukan praktik simulasi kerja, partisipan diharapkan mampu menunjukkan hasil dari materi yang dipelajari. Ketiga, yakni pengadaan seleksi, dilakukan pemilihan dari berbagai partisipan pemberdayaan. Keempat atau terakhir, ditetapkan sebagai pekerja, partisipan pemberdayaan dengan standar kompetensi yang baik akan dipekerjakan di Distrik BUMDes. Bagi partisipan yang belum dapat memenuhi kriteria, setidaknya sudah memiliki bekal untuk memperoleh pekerjaan di tempat lain. Hasil yang diperoleh dengan adanya pelaksanaan program Distrik BUMDes ini antara lain:

- 1) Peningkatan pendapatan asli desa
- 2) Kesempatan kerja yang disediakan membantu masyarakat untuk perbaikan nasib hidup
- 3) Meningkatkan penduduk yang berwirausaha di lokasi sekitar kawasan
- 4) Penurunan angka pengangguran yang signifikan

Elemen masyarakat yang ikut serta dalam pemberdayaan calon pekerja pada akhirnya akan mengetahui dinamika pekerjaan. Hal tersebut berdampak pada kesiapan dan kualitas diri apabila ingin mencari pekerjaan yang lebih baik nantinya. Penerapan program Distrik BUMDes sangat berdampak bagi masyarakat dan desa. Masyarakat yang dalam konteks ini ialah pemuda, diberikan kesempatan untuk bekerja sehingga kemampuan yang dimilikinya akan meningkat. Energi yang dimiliki oleh pemuda sangatlah besar dan sangat rentan terhadap pengaruh positif dan negatif. Meskipun penuh akan pengaruh, pemuda dapat dijadikan modal dasar sebagai agen perubahan sosial (Astuti, 2019). Kondisi lingkungan sekitar pastinya akan mempengaruhi tingkah laku kalangan muda. Apabila seseorang berusia muda hidup dengan berinteraksi pada lingkungan yang penuh akan hal negatif, dipastikan membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri maupun masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh desa menjadi berkembang cepat disebabkan adanya upaya penekanan angka pengangguran yang dilakukan melalui program Distrik BUMDes. Fungsi sosial dan ekonomi dari lembaga usaha desa berperan untuk mengutamakan segala kepentingan masyarakat dan desa (Rosyadi dkk., 2021). Desa akan lebih mudah menggapai predikat mandiri jika saja permasalahan ekonomi dapat diatasi dengan baik.

Hambatan dan solusi program Distrik BUMDes

Dengan usia BUMDes Maju Mandiri yang dianggap seumur jagung, tentu hal ini menyebabkan kendala yang dialami pun tidak terlalu banyak dan berskala besar. Hambatan yang dilalui berasal dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam, bersumber dari pelaksana operasional BUMDes itu sendiri. Pada awal penerapan program, pelaksana mengalami kebingungan untuk menentukan sasaran penyelenggaraan kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Sedangkan faktor dari luar berasal dari perilaku dan pandangan masyarakat mengenai lembaga BUMDes. Terbatasnya kemampuan masyarakat yang menjadi partisipan program pemberdayaan dalam menerima ilmu pengetahuan serta rasa malas mengikuti tahapan kegiatan. Mereka cenderung berpikir bekerja itu mudah tanpa harus dilalui dengan berbagai pembinaan.

Dalam menghadapi berbagai kendala yang menjadi hambatan dalam berjalannya program, pelaksana operasional BUMDes menerapkan solusi dengan:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, bertujuan untuk meminta saran dan arahan tentang kebijakan yang akan diterapkan nantinya
- 2) Berdiskusi dengan kalangan muda, kawasan Distrik BUMDes yang bermanfaat sebagai tempat kumpulnya kalangan usia muda memudahkan pihak pelaksana untuk berbincang secara mendalam mengenai gagasan yang mereka miliki
- 3) Penyesuaian bahan ajar, berguna untuk memudahkan partisipan pemberdayaan dalam menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh pengajar
- 4) Menggunakan tenaga pendidik ahli, supaya materi-materi yang diajarkan dapat disampaikan dengan baik

Sejatinya banyak solusi yang sudah diterapkan dan sedang dijalankan oleh BUMDes Maju Mandiri. Berbagai solusi yang telah dilakukan diharapkan bisa mengurangi dampak dari hambatan dalam menjalankan program.

SIMPULAN

Penyelenggaraan program-program yang dilakukan BUMDes Maju Mandiri berfokus untuk menangani permasalahan ekonomi dan sosial. Dengan menjalankan pada tiga bidang program yang meliputi pengelolaan pasar, pengelolaan sampah, dan tata usaha ditujukan sebagai usaha membantu



masyarakat. Pengelolaan potensi yang baik dan berkelanjutan serta pengoptimalan pada kegiatan yang diselenggarakan menjadi hal penting dalam membangun desa.

BUMDes Maju Mandiri terkesan berbeda dengan lembaga usaha milik desa lain, hal tersebut disebabkan oleh adanya kawasan usaha milik desa yang menyajikan hidangan makanan dan minuman bagi para pengunjung. Selain berfungsi sebagai tempat untuk menikmati waktu luang bersama orang-orang yang dicinta, penekanan angka pengangguran pun turut diupayakan melalui pengadaan kegiatan pemberdayaan pada pemuda yang nantinya menjadi pekerja di Distrik BUMDes. Pemberdayaan dimaksudkan untuk membekali para partisipan agar dapat berkompeten. Dengan hadirnya kawasan tersebut, desa mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Pelaksanaan pembangunan pun diharapkan dapat berjalan semestinya apabila sering dilakukan upaya menekan permasalahan yang terjadi.

Hambatannya dinilai tidak memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan program Distrik BUMDes. Hambatan cenderung bersumber dari kalangan masyarakat seperti munculnya rasa malas dan rendahnya kemampuan dalam menerima ilmu pengetahuan. Solusi yang diterapkan seperti adanya usaha untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, berdiskusi dengan pemuda, penyesuaian materi ajar, dan menggunakan tenaga pendidik ahli diharapkan dapat meminimalisir kuantitas dan jangkauan dari kendala yang dialami.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tulus atas dedikasi dan kerja samanya penulis berikan kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dari awal hingga akhir penelitian. Terima kasih dari penulis berikan kepada:

- 1) Dr. Edy Purwanto, M.Si.
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang
- 2) Kasmin
Kepala Desa Jungjang
- 3) Rahmat Hidayat
Sekretaris Desa Jungjang
- 4) Saripin
Direktur BUMDes Maju Mandiri Desa Jungjang
- 5) Ahmad Yana
Pengelola Distrik BUMDes

REFERENSI

- Alghofari, F., & Pujiyono, A. (2011). Analisis tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007 (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro)
- Arbarini, M., Rifai, A., & Mulyono, S. E. (2018). Model Literasi Berbasis Entrepreneurship dalam Peningkatan Ekonomi Produktif Perempuan Nelayan Tradisional. In *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* (Vol. 2, Issue 2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>
- Astuti, E. Z. L. (2019). Gerakan Literasi Digital: Studi Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Sistem Informasi Potensi Kreatif Desa di Kulonprogo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(2). <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-05>
- Borgen, W. A., & Amundson, N. E. (1987). The dynamics of unemployment. *Journal of Counseling & Development*, 66(4), 180-184
- Conti-Ramsden, G., Durkin, K., Toseeb, U., Botting, N., & Pickles, A. (2018). Education and employment outcomes of young adults with a history of developmental language disorder. *International Journal of Language and Communication Disorders*, 53(2), 237-255
- Endah, K. (2019). Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 25-33
- Feldmann, H. (2009). The unemployment effects of labor regulation around the world. *Journal of Comparative Economics*, 37(1), 76-90. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2008.10.001>
- Franita, R. (2016). Analisa Pengangguran Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (Vol. 1)
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam rangka menekan laju urbanisasi. *WIDYATECH Jurnal Sains Dan Teknologi*, 10(3), 61-72
- Harjanto, T. (2014). Pengangguran dan pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi*, 2(2), 67-77



- Harobu, F., Laru, U., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 8(4), 367
<https://doi.org/10.1111/1460-6984.12338>
<https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2)
- Izzah, K. D., & Kolopaking, L. M. (2020). Manfaat Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 37-54. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.37-54>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 14-25
- Jenniches, S. (2018). Assessing the regional economic impacts of renewable energy sources – A literature review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 93, 35-51. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.05.008>
- Lestari, P. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Peran Pencapaian Tujuan BUMDes Mandiri Jaya dalam Pengelolaan Dana Desa Sepakung Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 149-164
- Lestari, T. S., & Suminar, T. (2020). Pemberdayaan sebagai Upaya Peningkatan Konservasi Budaya Lokal di Desa Menari Tanon. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 1-16.
- Muhdar, H. M. (2015). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah Dan Solusi. *Al-Buhuts*, 11(1), 42-66
- Padmaswari, N. P. I., Sutjipta, N., & Putra, I. G. S. A. (2018). Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (Ppl) Sebagai Fasilitator Usahatani Petani Di Subak Empas Buah Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata (Journal Of Agribusiness And Agritourism)*, 7(2), 277-285. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/JAA>
- Pangestu. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424-440
- Ridzal, N. A., & Hasan, W. A. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri*, 4(1), 98-106
- Rosyadi, S., Setyoko, P. I., Kurniasih, D., Ramadhanti, W., Kusuma, A. S., & Atika, Z. R. (2021). Penguatan Kapasitas Peran Sosial Bumdes dalam Penanggulangan Dampak Ekonomi COVID-19. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 27-32. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2554>
- Sa'diyah, N., & Arbarini, M. (2021). Pembelajaran Literasi Anak Terintegrasi Kecakapan Hidup di TBM Warung Pasinaon Bergas Lor Kabupaten Semarang. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 152-161
- Titioaka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. (2020). Pengelolaan Keuangan BUMDES di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), 197-216
- Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial